

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSJ MENUR SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIAN EVA SANJAYA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 842931

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA MOJOKERTO , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 519.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA VL 1.5 4X2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
3. MOTOR, HONDA F1CO2N28LO AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 25.250.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.632.231.753

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.226.481.753

III. HUTANG

Rp. 1.063.909.488

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.162.572.265



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.